

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Kepemimpinan**

Kepemimpinan secara etimologi merupakan kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama sehingga yang bersangkutan menjadi struktur awal dari proses kelompok.

Kepemimpinan dibutuhkan masyarakat, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat<sup>1</sup>. Peran pemimpin sangatlah penting dalam organisasi, karena tanpa pemimpin suatu organisasi hanya merupakan kegagalan. Seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai tugas dalam mengatur dan menggerakkan sejumlah besar orang-orang yang mempunyai sikap, tingkah laku dan latar belakang yang berbeda-beda, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Ordway Tead mendefinisikan Kepemimpinan sebagai perpaduan berbagai hal yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain

---

<sup>1</sup><http://jtrap.ppi.unp.ac.id/index.php/JTRAP/article/view/17/14> diakses hari Selasa tanggal 24 November 2020. Pukul.10.27 WIB.

menyelesaikan tugasnya<sup>2</sup>, sedangkan menurut Hasibuan. Kepemimpinan adalah cara orang memimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dimana definisi kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi tiga elemen yaitu;

1. Kepemimpinan merupakan proses
2. Kepemimpinan merupakan satu konsep relasi (hubungan) antara pimpinan dan bawahan
3. Kepemimpinan merupakan ajakan kepada orang lain

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pengertian pemimpin adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi.

Adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

1. Kelancaran berbicara

Bukan hanya memiliki perbendaharaan kata yang luas tetapi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.

2. Kemampuan untuk memecahkan masalah

Ciri dari pemimpin yang efektif, yaitu mampu memecahkan masalah dan membantu dalam pemecahan masalah yang ada di dalam organisasi.

3. Kesadaran akan kebutuhan

Pemimpin yang efektif, mengerti akan kebutuhan dari bawahannya baik dinyatakan atau tidak, dan mengetahui bagaimana dapat memuaskannya.

4. Keluwesan

---

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal.2.

Pemimpin mampu menyesuaikan organisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tanpa meresahkan pegawainya.

5. Kesiapan menerima tanggung jawab

Menerima semua tanggung jawab serta pemenuhan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi.

6. Kecerdasan

Pemimpin yang efektif tidaklah harus jenius tetapi mampu membawa kesejahteraan setiap pegawainya.

7. Kesadaran diri dan lingkungan

Tidak merasa pandai sendiri, tetapi memandang orang lain itu sama serta memperdulikan lingkungan sekitar.

8. Keterampilan sosial

Tidak merendahkan anggota kelompok dihadapan kelompok lain, karena pemimpin harus bijaksana serta mampu menghargai setiap anggota kelompok.

Diharapkan setiap pemimpin memiliki sikap yang dapat menunjang aktifitasnya dalam organisasi, meskipun setiap pemimpin tidaklah sama karakternya. Sebab sifat pemimpin yang efektif akan berperan sangat strategis untuk mencapai tujuan bersama harus profesional dalam menjalankan tugasnya.

### **2.1.1. Fungsi Kepemimpinan**

Seorang pemimpin berperan besar dalam menentukan setiap kebijakan sebuah organisasi. Tujuan organisasi bisa tercapai ketika seorang pemimpin mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, setiap organisasi atau kelompok membutuhkan seorang pemimpin yang mengerti tentang fungsi kepemimpinan, fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok

agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan organisasi yang bergerak ke arah pencapaian tepat sasaran.

Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan ketercapaian satu tujuan yang diharapkan. Peran pemimpin menurut Rivani menjadi mudah dilakukan jika memiliki kualitas pribadi, memiliki karakter, dan kompetensi dalam mengarahkan organisasi menuju visi, misi yang telah ditetapkan<sup>3</sup>.

1. Fungsi Utama, yang penting bagi proses kepemimpinan, yaitu:

- a) Pemimpin sebagai pematik
- b) Pemimpin sebagai eksekutif
- c) Pemimpin sebagai perencana
- d) Pemimpin sebagai pembuat kebijakan
- e) Pemimpin sebagai tenaga ahli
- f) Pemimpin sebagai pengendali hubungan dalam kelompok
- g) Pemimpin sebagai pemberi penghargaan dan hukuman

2. Fungsi hiasan, yang mungkin dilakukan atau ditugaskan kepadapemimpin

karena jabatan kepemimpinannya, yaitu:

- a) Pemimpin sebagai panutan
- b) Pemimpin sebagai simbol kelompok
- c) Pemimpin sebagai ayah angkat

---

<sup>3</sup>Sagala Syaiful, *Pendekatan Dan Model Kepemimpinan*,( Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).Hal,49.

Adapun menurut menurut (Zainal, Hadad, & Ramly) secara operasional dikelompokkan ke dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu :

a) Fungsi intruksi

Komunikasi satu arah, pemimpin sebagai komunitaor merupakan penentu kebijakan agar keputusan dilakukan secara efektif dan mampu momotivasi orang lain untuk mengikuti perintah.

b) Fungsi konsultasi

Komunikasi dua arah, dimana penetapan keputusan pemimpin perlu mempertimbangkan kepada pegawainya untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) sehingga keputusan yang diambil akan lebih mudah mendapatkan dukungan.

c) Fungsi partisipasi

Pemimpin harus berusaha mengaktifkan keikutsertaan pegawainya baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Partisipasi bukan berarti bertindak bebas tetapi lebih terarah dalam kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

d) Fungsi delegasi

Memberikan limpahan wewenang atau menetapkan keputusan baik dalam konteks persetujuan ataupun tidak dari pimpinan. Sedangkan orang yang di percaya penerima delegasi diyakini merupakan tangan kanan pimpinan

e) Fungsi pengendalian

Kepemimpinan yang efektif drhingga mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah untuk tercapainya tujuan bersama.

Selain itu, seorang pemimpin yang baik harus melaksanakan empat peran penting, yaitu:

- a) Menjadi Panutan (*Moral Personal*)
- b) Menjadi Perintis (*Moral Visioner*)
- c) Menjadi Penyelaras (*Moral Institutional*)
- d) Menjadi Pembudaya (*Moral Cultural*)

### **2.1.2. Tipe atau Gaya Kepemimpinan**

Gaya kepemimpinan yang tepat mampu mencerminkan besarnya tanggung jawab atasan kepada karyawannya. Ketika karyawan mendapat contoh kepemimpinan yang tepat dari atasan, hal ini mampu mendorong karyawan untuk bersikap disiplin didalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diharapkan para pimpinan mampu memberikan contoh yang tepat bagi para pegawainya ataupun masyarakat. Adapun menurut Robbins, S.P dan M Coulter, gaya kepemimpinan ialah seorang pemimpin yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan karyawan, sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai dengan perilaku atau gaya seorang pemimpin tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan ialah pola menyeluruh dari tindakan seorang pimpinan, untuk mengendalikan bawahan yang di pimpinnya

dengan suatu ciri khas yang dominan pada dirinya untuk pencapaian tujuan organisasi.

Adapun dibawah ini tipe gaya kepemimpinan :

1. Tipe Kharismatis. Tipe kepemimpinan ini memiliki daya tarik yang tinggi sehingga seorang pemimpin memiliki dan mendapatkan pengikut yang banyak. Karakteristik utama tipe kharismatik yaitu : percaya diri, kemapanan, keyakinan yang kuat, serta pengetahuan yang cukup luas.<sup>4</sup> Tipe kepemimpinan yang karismatik ini pada dasarnya merupakan tipe kepemimpinan yang didasarkan pada karisma seseorang. Biasanya karisma seseorang itu dapat mempengaruhi orang lain. Dengan karisma yang dimiliki seseorang, orang tersebut akan mampu mengarahkan bawahannya. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya.
2. Tipe Paternalistis. Tipe kepemimpinan ini lebih pada keutamaan kepentingan bersama, sehingga semua bawahannya diperhatikan secara merata dan adil. Tipe kepemimpinan ini lebih menonjolkan diri sebagai pelindung, pengayom, penasehat, pembimbing atau pengajar dari bawahannya<sup>5</sup>. Tipe kepemimpinan seperti ini biasa terdapat di lingkungan masyarakat desa yang masih bersifat tradisional dan agraris. Seorang pemimpin paternalistik memiliki gaya memimpin yang kebapakan, melindungi tapi juga menggurui. Dalam menjalankan tugasnya, seorang paternalistik selalu mengutamakan kepentingan

---

<sup>4</sup>Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014).Hal 81

<sup>5</sup>Veithzal Rivai. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.182

bersama/kebersamaan. Ia selalu memperlakukan setiap orang dalam organisasinya sama, tidak ada yang lebih menonjol. Artinya seorang paternalistik berusaha memperlakukan semua orang dan semua satuan kerja yang terdapat ddalam organisasi seadil dan semerata mungkin. Karena paternalistik ini mempunyai arti sifat kebapaan, maka pemimpin tipe seperti ini cenderung mengayomi dan menjadikan bawahannya itu sebagai anaknya.

3. Tipe Militeristik. Tipe kepemimpinan ini menuntut para bawahannya untuk selalu disiplin, taat, setia, memiliki kebersamaan dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Pemimpin tipe ini sangat menjaga wibawanya dan jabatannya, sehingga ia ingin selalu disegani dan dihormati para bawahannya. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik adalah, lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan, sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya, tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya, komunikasi hanya berlangsung searah.
4. Tipe Otokratis. Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa organisasi dan apa yang diamanatkan padanya adalah miliknya sendiri, lebih mendahulukan kepentingannya sendiri daripada kepentingan organisasi, anggotanya dianggap sebagai bawahan yang harus selalu mengikuti keinginannya. Tipe kepemimpinan ini bersifat egois, anti kritik sehingga



apapun keputusannya yang menyangkut organisasinya semua keputusan ada padanya. Pemimpin tipe ini juga memaksa para bawahannya untuk setia, disiplin dan taat pada peraturan yang bersifat memaksa dan menghukum. Pemimpin yang bertipe otokrasi adalah tipe seorang pemimpin yang sombong. Seorang pemimpin tipe ini akan mencampuradukan antara kepentingan pribadi dan organisasi. Ia juga akan melakukan segala cara, yang penting tujuannya tercapai. Dalam menjalankan tugasnya, seorang autokrasi akan menuntut ketaatan penuh dari bawahan, Bersikap kaku dalam menegakkan disiplin, tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk mengemukakan alasan atau argumen, bernada keras dalam memberikan perintah atau intruksi, Jika bawahan melakukan kesalahan, pemimpin tipe ini cenderung menggunakan pendekatan punitif atau memberi hukuman, dan selalu berprinsip menang-kalah, pemimpin harus menang dan bawahan harus kalah.

5. Tipe Laissez Faire. Tipe kepemimpinan ini seorang pemimpin tidak memimpin namun memberikannya kepada kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri dalam kelompoknya. Pada tipe kepemimpinan ini seorang pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam kegiatan kelompok. Adapun sifat kepemimpinan laissez faire seolah-olah tidak tampak, sebab pada tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya akan cepat berhasil. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga yang dipimpin dengan gaya laissez

faire semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari pemimpinnya. Pemimpin tipe laissez faire biasanya menjadikan bawahan itu sebagai rekan kerja karena bersama-sama melaksanakan tugasnya sampai kepada tujuan yang diinginkan.

6. Tipe Populistis. Tipe kepemimpinan ini sangat berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Kurang percaya pada dukungan kekuatan serta bantuan-bantuan dari orang asing. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan pada penghidupan Nasionalisme.
7. Tipe Administratif. Tipe kepemimpinan ini yaitu tipe kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Sedang para pemimpinnya adalah seorang teknokrat dan administrator-administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah, Kepemimpinan tipe administratif itu mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Sednagkan para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian, dapat dibangun sistem admnistrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah, yaitu untuk memantapkan integritas bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada umumnya. Dengan kepemimpinan administratif ini diharapkan adanya perkembangan teknis, yaitu teknologi, industri, manajemen modern dan perkembangan sosial.

8. Kepemimpinan Demokratis. Menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Hubungan antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin diwujudkan dalam bentuk *human relation* yang didasari prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Pemimpin memandang orang lain sebagai subyek yang memiliki sifat-sifat manusiawi sebagaimana dirinya. Oleh karena itu setiap orang harus dimanfaatkan dengan mengikut sertakannya dalam semua kegiatan organisasi. Keikutsertaan itu disesuaikan dengan posisi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dan tanggung jawab yang sama pentingnya bagi pencapaian tujuan bersama<sup>6</sup>. Pemimpin demokratis dihormati dan disegani secara wajar, sehinggatercipta hubungan kerja yang positif dalam bentuk saling mengisi dan salingmenunjang. Perintah atau intruksi diterima sebagai ajakan untuk berbuatsesuatu demi kepentingan bersama atau kelompok yang selalu dapat ditinjaukembali bilamana tidak efektif. Inisiatif dan kreativitas anggota dalammelaksanakan intruksi selalu didorong agar terwujud cara kerja yang efektifdalam mencapai tujuan, tipe kepemimpinan ini dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari staf maupun masyarakat melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat.

Kurt Lewin mengemukakan bahwa pemimpin demokratis adalah pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggungjawab tentang terlaksananya tujuan hal ini agar setiap anggota bertamnggung

---

<sup>6</sup>Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), Hal.91-95

jawab, seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penilaian<sup>7</sup>.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar *pertama*, gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. *Kedua*, gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama. Dan *ketiga*, gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai<sup>8</sup>.

Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan demokratis antara lain:<sup>9</sup>

1. Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama personalia organisasi itu.
2. Bahwa, oleh pimpinan di anggap sebagai komponen pelaksana, dan secara integral harus di beri tugas dan tanggung jawab.
3. Disiplin, akan tetpi tidak kaku dan memecahkan masalah secara bersama.
4. Kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan tanggung jawab pengawasan.
5. Komunikasi dengan bawahan bersufat terbuka dan dua arah.

---

<sup>7</sup>Burhanuddin, *Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Malang: Bumi Aksara, 1994). Hal 245

<sup>8</sup>Veithzal Rivai Zainal, Muliaman Darmansyah Hadad, Mansyur Ramly, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2014). hlm. 36

<sup>9</sup>Danim Sudarwan, *Motifasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012). hal.76

Dari beberapa tipe atau teori tentang kepemimpinan yang sudah di jelaskan diatas maka penulis memilih unit analisa kepemimpinan demokratis, hal ini sejalan dengan pemikiran penulis yang ingin mengangkat bagaimana peran kepemimpinan kepala desa yang akan diteliti apakah kepala desa tersebut menghadirkan konsep kepemimpinan yang merakyat sehingga dapat memotivasi para warga atau masyarakatnya untuk berperan aktif dalam proses pembangunan lingkungan didesanya. Pembangunan tersebut bermakna dalam karena berkaitan dengan pembukaan wawasan terkait pola pikir berkemajuan baik fisik maupun non fisik.

## **2.2. Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kapala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan

lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Menurut UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Desa menurut HAW Widjaya menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran mengenai Desa adalah, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat<sup>11</sup>.

Kewenangan kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>11</sup>HAW Widjaya. 2003. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 3.

3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. menetapkan Peraturan Desa
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. membina kehidupan masyarakat Desa
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
9. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
10. mengembangkan sumber pendapatan Desa
11. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
12. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
13. memanfaatkan teknologi tepat guna
14. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
15. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
16. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat

menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya

sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan. Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:<sup>12</sup>

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

---

<sup>12</sup>Peraturan perundang-undangan no 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa



3. Mengajukan rencana dan menetapkan peraturan Desa.
4. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan masyarakat di Desa.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## **2.3. Partisipasi Masyarakat**

### **2.3.1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah bentuk ikutserta warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung maupun melalui perwakilan lembaga yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengumpulkan pendapat secara konstruktif.<sup>13</sup>

Partisipasi secara umum dimaknai sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam sesuatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan.

Partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi program-program partisipasi juga berkaitan dengan usaha tergantung untuk meningkatkan kontrol atas sumbernya dan institusi dan regulasi dalam situasi sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang

---

<sup>13</sup>A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi*, (Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatullah, 2003), Hal.200.

disusun secara bersama. Partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap memperbaiki kualitas hidup bersama, sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam proses perencanaan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
- c. Partisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan.<sup>14</sup>

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai sesuatu kegiatan nyata dalam setiap jenis kegiatan apabila pada diri manusia ada kemauan, kesediaan, kemampuan, upaya dan kesempatan atau peluang. Tujuan partisipasi masyarakat dapat berubah setiap waktu, tergantung lingkungannya. Awalnya partisipasi bertujuan untuk memberi kekuasaan kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di negara sedang berkembang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi hidup masyarakat memaksa mereka untuk memainkan peran penting dalam pembangunan. Sanoff berpendapat bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

### **2.3.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi**

partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu

---

<sup>14</sup>Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokus Media, 2014), Hal. 115.

program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Sedangkan Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Peran serta masyarakat antar satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan. Perbedaan wujud partisipasi ini kemudian akan memunculkan beberapa bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Ndraha berpendapat bahwa partisipasi bentuknya dapat berupa: kontak sosial dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima maupun menolaknya, partisipasi dalam perencanaan dan penetapan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan program pembangunan.

Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: <sup>15</sup>

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok

---

<sup>15</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet. Ke-3* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 84.

- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

### **2.3.3. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Partisipasi Masyarakat**

Faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam program yang di tawarkan oleh pemerintah, partisipasi bergantung pada kondisi ekonomi, sosial budaya dan keberadaan lingkungan dari masyarakat yang terlibat serta tingkat pendidikan masyarakat. Bahwa sosial yang dapat digunakan para perencana untuk dapat mengetahui bagaimana masyarakat terlibat dalam pembangunan adalah faktor geografis, organisasi dan budaya lokal, ekonomi masyarakat serta sosial politik yang berkembang<sup>16</sup>. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Adapu menurut Histiraludin

---

<sup>16</sup>Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES, Cet. Ke-3* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), Hal. 208.

“Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”.

#### **2.4.Kerangka Pikir**

Keberadaan pemimpin merupakan suatu keniscayaan dalam organisasi, bahkan ada kalanya keberadaan seorang pemimpin sama pentingnya dengan keberadaan organisasi itu sendiri karena apabila suatu organisasi tidak mempunyai seorang pemimpin maka organisasi tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemimpin ialah konselor, instruktur, dan pemuka yang ada didepan yang menerobos, menaklukkan (mengantisipasi dan memberi solusi), mengintegrasikan dan memberi warna dalam suatu organisasi. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula. Untuk itu pemimpin harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin.

Agar dapat berhasil dalam memimpin bawahan maupun masyarakatnya maka seorang pemimpin harus memiliki sifat, kualitas dan juga dituntut agar dapat mempengaruhi dan mengarahkan para bawahannya yang kesemuanya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kepala desa harus memiliki sifat atau gaya kepemimpinan demokratis terhadap peningkatan partisipasi masyarakat diantaranya, Mengikut sertakan seluruh anggota dalam segala kegiatan, kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan tanggung jawab pengawasan, komunikasi dengan bawahan bersufat terbuka dan dua arah.

Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat sehingga seorang kepala desa terpilih maka rakyatnya sudah mempercayakan kehidupan desanya diatur oleh seorang wakil dari mereka (kepala desa), sehingga seorang kepala desa dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam melayani, melindungi dan menjaga keutuhan desa. Kinerja kepala desa beserta stafnya merupakan tuntutan masyarakat yang harus dilaksanakan dalam kondisi perubahan sosial dan politik sehingga masyarakat tetap beradadalam situasi kondisi yang baik. Berdasarkan konsep dan teori yang ada maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

## Bagan 2.1

### Kerangka Pikir

